

Presiden: PPKM Lanjut Sampai Covid-19 Terkendali

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo menegaskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus diterapkan meskipun kasus aktif harian Covid-19 di tanah air sudah menurun.

"Jadi tolong setelah ini disampaikan PPKM tetap berlanjut sampai betul-betul kita yakin bahwa Covid ini 100 persen bisa kita kendalikan," kata Jokowi dalam arahan pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin, (9/5), di Istana Negara, Jakarta. Arahan Presiden antara lain mencakup penanganan pandemi Covid-19 dan gejolak ekonomi global.

"Saya ingin kita semuanya tetap konsentrasi pada masalah yang berkaitan dengan pandemi dan juga yang berkaitan dengan gejolak ekonomi global yang sampai saat ini belum berhenti, belum selesai dan itu menimbulkan ketidakpastian pada ekonomi semua negara," ujar Presiden.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang

Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers emerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk luar Jawa-Bali selama 2 pekan mendatang.

"PPKM di luar Jawa akan diperpanjang selama dua minggu ke depan," kata yang disaksikan secara daring, Senin.

Menko Airlangga menjelaskan PPKM level 1 diterapkan di 88 kabupaten/kota, level 2 di 276 kabupaten/kota, dan level 3 di 22 kabupaten/kota.

Kendati penerapan PPKM berlanjut, indeks reproduksi efektif di luar Jawa-Bali sudah di bawah satu persen yakni 0,997. Secara rinci, Papua, Kalimantan dan Nusa Tenggara masing-masing 0,99. Kemudian Sulawesi 0,98, Maluku

0,97 dan Sumatera 1.

"Artinya di luar Jawa-Bali kasus seluruhnya landai dan yang tertinggi di Lampung, namun konversi rumah sakit maupun isolasi relatif seluruhnya rendah," ucap Menko Airlangga.

Lebih lanjut ia menyampaikan terkait kinerja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang realisasinya telah mencapai 15,4 persen atau Rp70,37 triliun.

Dengan rincian realisasi di bidang kesehatan 9,7 persen atau Rp11,87 triliun, yang digunakan untuk insentif klaim tenaga kesehatan dan klaim pasien, perpajakan kesehatan dan Dana Desa.

Sedangkan realisasi program perlindungan masyarakat sudah Rp49,27 triliun atau 32 persen yang terdiri dari PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Desa, bantuan untuk pedagang kaki lima, warung dan nelayan, serta Kartu Prakerja. (Ant)-d

Loyalitas Nasabah, Kunci Pialang Teraktif

YOGYA (KR) - Pimpinan Cabang PT Rifaan Financindo Berjangka (RFB) Yogyakarta Dewi Diananingrum menyatakan, loyalitas nasabah menjadi kunci utama mempertahankan posisi RFB sebagai Pialang Teraktif Nomor 1 Kategori Pialang Gabungan Teraktif dan Pialang Bilateral Teraktif pada April 2022.

"Posisi teratas ini berdasarkan jumlah transaksi 10 pialang teraktif anggota PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)," ujar Dewi Diananingrum, Senin (9/5).

Dikatakan, dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan beberapa waktu lalu, layanan prima perusahaan teruji dalam menjaga dan merawat nasabah. "Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah yang tetap memilih loyal hingga saat ini," tandasnya.

Berdasarkan SK Kepala Bappebti No 3/2022 tanggal 8 April 2022, pembekuan kegiatan usaha RFB telah dicairkan, begitu pula Izin Wakil Pialang Berjangka RFB telah aktif kembali berdasarkan SK Kepala Bappebti No 4/2022 tanggal 18 April 2022.



KR-Istimewa
Dewi Diananingrum

"Sejak saat itu, RFB telah dapat melakukan penerimaan nasabah baru dan menjalankan aktivitas operasional secara normal," jelasnya.

Ditambahkan, dalam rangka memenuhi komitmen penyempurnaan layanan transaksi untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, RFB melakukan pembenahan internal dan mengembangkan sistem layanan berupa penyempurnaan standar operasional prosedur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, mekanisme edukasi di lapangan dan penyempurnaan sistem layanan yang lebih cepat dan efisien.

"Di antaranya pengembangan sistem transaksi berbasis one time password (OTP) dan online withdrawal system (OWS). Dengan layanan yang semakin cepat, terukur dan efisien diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan transaksi nasabah," katanya.

Dengan peningkatan mutu SDM dan target 1.000 Wakil Pialang Berjangka pertahun secara bertahap, diharapkan RFB mampu menjadi Pialang Berjangka dengan Wakil (San)-d

Pemda Sambungan hal 1



KR-Riyana Ekawati

Depo sampah di Kotabaru ditutup sebagai dampak dari penutupan TPST Piyungan.

kalaupun tidak pasti tumpukan sampah akan semakin banyak," kata salah satu warga di sekitar depo sampah Kotabaru, Ferry, Senin (9/5).

Sementara itu ketika dimintai tanggapan soal adanya tuntutan warga agar TPST Piyungan di Bantul ditutup secara permanen, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji mengatakan, sebetulnya Pemda DIY sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi persoalan sampai di TPST Piyungan.

Mulai memperpanjang usia dayaampung di tempat pembuangan lama TPST Piyungan sampai skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bersama Pemerintah Pusat. Mengingat prosesnya masih terus berlangsung pi-

haknya meminta agar semua pihak bisa bersabar. Karena Pemda DIY bersama stakeholders terkait terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi sampah di TPST Piyungan.

"Pemda DIY sebenarnya telah menyusun rencana jangka panjang untuk TPST Piyungan. Nantinya di sana akan didirikan pabrik untuk pengolahan sampah dengan menggunakan skema KPBU yang prosesnya terus disiapkan. Adapun untuk lokasi masih disekitar TPST Piyungan, karena Pemda sudah membebaskan lahan sekitar 6 hektare. Sampah disana bukan hanya dibuang tapi diolah sehingga sampah itu akan menghasilkan barang yang produktif," kata Baskara Aji.

Menurut Baskara Aji, keberadaan

TPST Piyungan merupakan tumpuan pembuangan sampah bagi sejumlah wilayah di DIY seperti Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Untuk itu, pihaknya siap melakukan dialog dengan warga untuk menampung aspirasi mereka dan berupaya mencari solusi terbaik. Tentunya sampai proses itu berjalan, skema KPBU terus dilakukan. Apalagi saat ini sudah ada beberapa investor yang tertarik untuk menanganai sampah di TPST Piyungan.

"Nanti investor yang sudah mengajukan proposal akan segera dilakukan seleksi. Mudah-mudahan pada tahun 2024 sudah bisa beroperasi. Mengingat sekarang sudah di Jakarta sudah ada beberapa penawar yang nanti akan kita seleksi," jelasnya. (Ria)-d

Sampah Sambungan hal 1

pada lokasi-lokasi wisata yang banyak dikunjungi oleh pemudik maupun wisatawan. Namun demikian, hotel, tempat penginapan, dan restoran juga memberikan kontribusi terhadap bertambahnya volume sampah. Jenis sampah yang dihasilkan dapat berupa sampah organik dan nonorganik. Kedua jenis sampah tersebut memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan penanganan berbeda.

Pengelolaan sampah selama libur Lebaran memerlukan komitmen dan peran aktif pemerintah daerah terutama dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Terkait dengan hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri LHK Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.04/2022 tentang Pengelolaan Sampah dalam Rangka Mudik Lebaran. Namun demikian, warga masyarakat tetap harus didorong untuk secara aktif mengelola sampah dengan baik, sehingga akan terjadi sinergitas dalam penanganan masalah persampahan.

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan sehingga dapat mengurangi dan menangani sampah. Data dari KLHK menunjukkan bahwa hampir 40% dari sampah berasal dari rumah tangga di mana jenis sampah yang diperoleh sebagian berupa sampah sisa makanan.

Bentuk peran serta masyarakat dalam permasalahan sampah di antaranya adalah dengan melakukan pembuangan sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan pengelolaan tempat wisata maupun di tempat-tempat keramaian. Perilaku masyarakat yang peduli sampah, terutama dengan memilah sampah akan memudahkan dalam proses pengolahannya. Sampah yang telah terpilah akan lebih mudah tertangani. Sehingga volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir akan bisa ditekan seminimal mungkin. Pengurangan volume sampah akan dapat memperpanjang usia sekaligus akan me-

ngurangi beban dari TPA.

Pemilahan sampah dapat dimulai dari lingkungan keluarga dengan membedakan antara sampah organik dan nonorganik. Sampah organik relatif mudah untuk diolah karena akan dapat dikonversi menjadi kompos sebagai pupuk organik. Sedangkan sampah nonorganik yang diantaranya berupa botol dan plastik bekas, kertas, bungkus makanan atau minuman instan sulit diurai sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk dikelola secara khusus. Meskipun sampah nonorganik tidak bisa terurai, tapi pemanfaatannya bisa dikomersialkan dan dijual untuk diolah kembali menjadi barang yang layak pakai. Apabila penanganan dan pengurangan sampah dapat mulai dilakukan dari rumah tangga, maka diharapkan dapat mengurangi 30% dari volume sampah yang diangkut ke TPA. Di samping itu pengelolaan dan penanganan sampah yang baik akan menimbulkan paradigma bahwa sampah menyimpan potensi ekonomi kepada para pelaku sampah.

(Penulis adalah Dosen Teknik Kimia, Universitas Islam Indonesia)-d

Pertumbuhan Sambungan hal 1

Rinciannya, bidang kesehatan sebesar 9,7 persen atau Rp 11,87 triliun, yakni untuk insentif nakes dan klaim pasien.

Selain itu, terkait perlindungan masyarakat realisasinya sudah Rp 49,27 triliun atau 32 persen. Ini terdiri dari PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Dana Desa, Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan, serta Kartu Prakerja.

"Penguatan pemulihan ekonomi sekitar 5,2 persen atau Rp 9,2 triliun, baik itu di sektor pariwisata, dukungan UMKM," ujar Airlangga.

Menko Perekonomian juga menyampaikan catatan yang diberikan Presiden Jokowi agar Pemerintah memperhatikan terkait energi dan pangan untuk ketahanan nasional ke depan. (Fie)-d

Sebelum Sambungan hal 1

Nasib tragis yang menimpa dua korban tersebut meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Tak terkecuali teman-teman dari daerah asal korban, yang tinggal di Yogya. Mereka berharap, polisi segera mengungkap peristiwa yang terjadi Minggu (8/5) dini hari itu, sekaligus memproses hukum pelakunya.

Sekretaris Daerah DPD Pemuda Batak Bersatu DIY, Immanuel mendesak Polda DIY serius menangani kasus itu. "Kedatangan kami untuk memberikan dukungan kepada Kapolda DIY dan jajarannya. Kami minta, kasus ini ditangani serius, demi terciptanya keamanan dan kenyamanan Yogya," ujarnya di Mapolda.

Korban DS merupakan mahasiswa semester akhir yang sedang menggarap skripsi di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, yang tinggal di Sewon Bantul. Saat

kejadian, DS dan lima rekannya (termasuk korban TIP), pulang sesuai menghadiri acara bersama teman-teman mahasiswa satu daerahnya.

Saat berpapasan dengan kelompok pelaku, rombongan korban dimaki-maki, sehingga mereka menanyakan ada persoalan apa.

"Kejadiannya begitu singkat, ada pelemparan, kemudian si pelempar dikejar teman korban, sedangkan korban tidak ikut mengejar. Karena yang dikejar tidak tertangkap, mereka balik badan dan melihat kedua korban sudah roboh," ungkap Immanuel.

Menurut Immanuel, motor pelaku ada yang tertinggal di sekitar TKP. Bahkan identitas pelaku juga sudah dikantongi polisi. Hanya saja, ia belum mengetahui apakah polisi dalam hal ini Ditreskrim Polda DIY, sudah mengamankan pelaku atau belum. (Ayu)-d

Menhub Sambungan hal 1

"Yang paling masif adalah rekan-rekan Kepolisian di jalur darat, dan kemudian di penyeberangan, udara, kereta api dan laut," kata Menhub.

Menhub mengatakan, mudik tahun ini menghasilkan satu pergerakan yang sangat banyak, yang berakibat pelayanan yang diberikan belum maksimal. "Oleh karena kami sampaikan permohonan maaf belum bisa memenuhi harapan semua pihak. Kami akan lakukan evaluasi agar kegiatan mudik dan juga kegiatan dimana akan ada pergerakan yang masif di masa yang akan datang, dapat diantisipasi dengan lebih baik," tuturnya.

Menhub berharap, kegiatan mudik tahun ini menjadi awal dari kebangkitan ekonomi dan juga menjadi tanda dimulainya masa endemi. "Kami selalu menekankan agar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, sehingga diharapkan tidak terjadi kenaikan kasus usai masa mudik," ujarnya.

Menhub menyampaikan

terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi dan komunikasi yang baik, yang telah dilakukan antara Kementerian/Lembaga, Polri, operator sarana dan prasarana transportasi dan unsur terkait lainnya.

Menhub juga mengucapkan terima kasih atas dukungan media massa dalam mem-

bantu mengkomunikasikan dan menyebarkan semua kebijakan mudik kepada masyarakat, sehingga dapat diketahui, dimengerti dan dijalankan.

"Kami juga sampaikan terima kasih kepada para pemudik yang telah mengikuti berbagai imbauan dari Pemerintah," ujarnya. (Imd)-d



Prakiraan Cuaca		Selasa, 10 Mei 2022				
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					23-31	70-95
Sieman					21-30	70-95
Wates					23-31	70-95
Wonosari					23-31	70-95
Yogyakarta					23-31	70-95

Prioritas Akurasi Informasi, Langkah Awal dalam Melawan Hoax di Media Sosial



Creative Economy Park



Kadek Kiki Astria SIKom, MA
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas AMIKOM Yogyakarta

MEDIA sosial masih memiliki tempat khusus di hati masyarakat Indonesia sampai saat ini, terlepas dari perkembangan keberagaman fitur yang disajikan

didalamnya. Lebih dari 50% masyarakat Indonesia tercatat memiliki akun media sosial baik itu Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Youtube dan lain sebagainya. Namun berawal dari media sosial inilah masyarakat membawa Indonesia berada pada level darurat hoax.

Dapat dikatakan bahwa saat ini media sosial sedang bermetamorfosis dengan perkembangan dibidang IT, bidang ekonomi, kesehatan, dan politik. Segala bentuk komunikasi yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan politik dan ekonomi sering dilakukan dengan melibatkan media sosial. Masyarakat dapat dengan

mudah menerima informasi melalui media sosial baik dengan melakukan penelusuran di kanal pencarian, aplikasi, portal berita, dan pesan berantai. Sayangnya masyarakat sampai detik ini masih banyak yang mencerna informasi tersebut dengan sangat polos tanpa mempertimbangkan keakuratan isi informasi tersebut.

Fenomena kepolosan masyarakat Indonesia dalam menerima informasi di media sosial menyebabkan substansi penyebaran hoax. Mulai dari pesan berantai di aplikasi, artikel pada blog, sampai pada foto dan video yang di edit sedemikian rupa. Mulai dari isi pesan

hibur, provokasi, bahkan bersifat mengancam.

Pertanyaan yang mungkin muncul saat ini adalah "dimana letak peran pemerintah pada fenomena ini, apakah yang telah pemerintah lakukan?". Pemerintah tentu saja telah melakukan berbagai hal dalam menanggulangi hoax yang masih tumbuh subur di Indonesia. Mulai dari memetakan masalah komunikasi yang muncul dalam penggunaan media sosial, hingga melakukan literasi kepada masyarakat Indonesia mengenai cara memeringi hoax mulai dari lingkungan terkecil hingga yang terluas. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah

pun jelas mulai dengan melakukan literasi terus menerus, menggandeng tokoh masyarakat, serta orang-orang yang aktif di media sosial (pengamat media sosial, influencer), hingga pembekalan pada humas-humas pemerintah daerah mengenai keberagaman kehidupan bermedia sosial, masyarakat sipil, dan aparat-aparat pemerintah untuk menghindari kekacauan komunikasi.

Kehidupan bermedia sosial memunculkan keberagaman fenomena, dalam dunia ekonomi dan politik media sosial seringkali dijadikan alat untuk menyebarkan informasi yang bersifat merugikan orang lain,

fitnah, dan provokasi. Dalam ranah kesehatan media sosial sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoax berita kesehatan dan pemasaran produk-produk tertentu demi mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk itulah pemerintah perlu melakukan literasi secara terus menerus karena tujuan pemerintah bukan sekedar untuk memberikan informasi namun juga menciptakan masyarakat yang produktif dalam berkomunikasi. Jadi masyarakat tidak hanya dibekali ilmu "saring sebelum sharing" namun juga masyarakat siap untuk menjadi kritis dan aktif dalam melawan penyebaran hoax. Kemajuan

teknologi yang sangat pesat memang memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses apa yang mereka ingin ketahui mengenai sebuah fenomena atau informasi dimanapun dan kapanpun dengan waktu yang sangat cepat, namun yang perlu menjadi prioritas oleh masyarakat disini adalah kualitas akurasi pada informasi tersebut. Masyarakat Indonesia, mari bantu pemerintah dalam menanggulangi hoax di media sosial dengan cara bijak bermedia sosial dan utamakan akurasi informasi yang didapatkan di media sosial.***